

BAB III

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. SAJIAN DATA

1. Tahapan Pemasaran Sosial Program Sekolah Siaga Kependudukan

a. Tahap Analisis dan Pemilihan Target Sasaran

Sebagai program nasional Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program dari BKKBN Pusat kemudian dijalankan oleh perwakilan BKKBN provinsi, sehingga tidak ada latar belakang khusus program SSK dilaksanakan di Yogyakarta. Program SSK sudah diinisiasi tahun 2011 sejak berdirinya bidang Pengendalian Kependudukan. Latar belakang dibentuknya program ini yaitu temuan data-data tentang permasalahan kependudukan di Indonesia seperti jumlah penduduk, angka kelahiran total nasional, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, perkawinan usia anak, dan rata-rata lama sekolah. Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan saat diwawancarai pada 16 April 2019 berikut ini :

“Latar belakang dibentuknya Sekolah Siaga Kependudukan karena didorong oleh data-data yang menunjukkan jumlah penduduk, angka kelahiran total nasional, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, perkawinan usia anak, dan rata-rata lama sekolah di Indonesia.”

Sekolah Siaga Kependudukan adalah salah satu implementasi program Pendidikan Kependudukan jalur formal yang menasar generasi muda khususnya pelajar SD, SMP dan SMA agar mereka dapat memahami dan

peduli terhadap isu-isu kependudukan sejak dini. Wawasan tentang kependudukan sendiri sangat luas, diantaranya tentang manfaat dan dampak jumlah penduduk, mobilitas penduduk, pemahaman kesehatan reproduksi remaja dan lainnya. Dengan adanya pemahaman dan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan diharapkan dapat mempengaruhi perilaku-perilaku remaja yang mendukung dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia salah satu satunya dengan tidak melakukan perkawinan usia anak. Seperti yang diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Sekolah Siaga Kependudukan merupakan jalur formal dari pendidikan kependudukan yang menasar sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tentunya materi pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia dan tingkat sekolahnya. Upaya ini dilakukan dengan harapan wawasan kependudukan dapat sampai kepada generasi muda sedini mungkin. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menjadi model pembangunan ataupun aset, sebaliknya apabila generasi muda yang merupakan sasaran dari program ini yaitu remaja tidak memiliki kualitas yang baik maka akan menjadi beban negara.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ka Sub Bidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN DIY Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Penduduk itu bisa menjadi aset bisa menjadi beban. Bagaimana ke depannya seharusnya agar generasi selanjutnya menjadi aset, sedini mungkin kita kenalkan dengan masalah-masalah kependudukan, bagaimana mereka menyiapkan masa depan mereka, bagaimana dia mampu mengenali masalah kependudukan di lingkungannya”

Di samping itu Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030 di mana populasi usia produktif 15-64 lebih besar

dibandingkan usia tidak produktif yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Pemerintah berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mengelola pembangunan ekonomi pada saat terjadinya bonus demografi. Karena bonus demografi akan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi apabila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari bonus demografi. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi bencana jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai.

b. Penetapan Bauran Pemasaran Sosial

1) *Product* (produk)

Produk dari program Sekolah Siaga Kependudukan ini adalah gagasan atau ide yang diharapkan dapat mengubah perilaku generasi muda khususnya pelajar melalui pendidikan kependudukan yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Gagasan atau ide yang ditawarkan yaitu agar para siswa dapat memahami dan peduli terhadap berbagai permasalahan kependudukan yang luas dan mengimplentasikan ke dalam kehidupannya sehingga mereka dapat merencanakan masa depannya sebaik mungkin serta tidak melakukan perkawinan usia anak. Seperti yang diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Diharapkan dengan adanya integrasi isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran dapat menambah wawasan para peserta didik terhadap

isu-isu kependudukan dan juga melatih mencari solusi dalam mengatasi masalah kependudukan. Dan salah satu tujuannya agar peserta didik tidak melakukan pernikahan dini.”

2) *Price* (harga)

Dalam menerapkan program SSK terdapat pengeluaran biaya oleh sekolah yang termasuk dalam bentuk *monetary cost* karena terdapat pengeluaran sejumlah uang dalam pengelolaan pojok kependudukan dan kegiatan-kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan program SSK. Pojok kependudukan dikelola oleh siswa yang tergabung dalam kelompok kepemimpinan dan dibentuk sesuai SK Kepala Sekolah. Kegiatan mereka diantaranya membuat mading mengenai informasi kependudukan di pojok kependudukan. Sehingga biaya yang dikeluarkan sekolah dalam menerapkan program SSK berbeda-beda tergantung pengelolaan dari masing-masing sekolah.

Gambar 2. Pojok Kependudukan



Seperti yang diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. :

“Sekolah yang menerapkan sekolah siaga kependudukan, di dalamnya terdapat pojok kependudukan yaitu tempat yang menyediakan literasi-literasi maupun informasi-informasi mengenai kependudukan. Peserta didik dilibatkan dengan membuat mading mengenai isu-isu kependudukan seperti puisi, poster, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan kreatifitas para peserta didik. Sekolah dapat menyisipkan atau mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan program SSK selain integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran dan pojok kependudukan. Sehingga adanya biaya yang dikeluarkan tergantung dari kreatifitas sekolah masing-masing.” (16 April 2019)

3) *Place* (tempat)

Place atau tempat dalam bauran pemasaran merupakan sarana di mana produk sosial yang ditawarkan diperoleh oleh target sasaran. Penempatan dan distribusi produk sosial *tangible* (nyata) berbeda dengan produk sosial yang *intangible* (tidak nyata). Proses distribusi produk nyata dapat dilakukan seperti pada produk komersial. Berbeda dengan produk sosial berupa ide atau praktik, produk *intangible* didistribusikan melalui komunikasi (Pudjiastuti, 2016:18). Pentingnya pendidikan kependudukan kepada generasi muda, BKKBN DIY menetapkan untuk mendistribusikan materi pendidikan kependudukan melalui program SSK ke SMP dan SMA di setiap kabupaten/kota DIY.

4) *Partnership* (kemitraan)

Untuk mencapai keberhasilan program SSK, BKKBN DIY tidak bisa sendiri dalam menjalankan program. Mitra kerjasama penting untuk memudahkan pengelolaan program dan mendukung keberlangsungan

program. Mitra BKKBN DIY yaitu dinas atau pemerintah daerah yang turut bekerjasama dengan BKKBN DIY dalam pelaksanaan program SSK. Berdasarkan hasil wawancara, berikut mitra BKKBN DIY dalam pelaksanaan program SSK dan bentuk kerjasamanya :

Tabel 2. Mitra Kerjasama Program SSK BKKBN DIY

No	Mitra Kerjasama	Bentuk Kerjasama
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY	Kewenangan pembinaan dan pengelolaan SMA menjadi tanggungjawab DIKPORA Provinsi
2	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten/Kota	Kerjasama yang terjalin karena kewenangan pembinaan dan pengelolaan SMP menjadi tanggungjawab DIKPORA Kabupaten/Kota
3	OPD KB Provinsi	Koordinasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana wilayah Provinsi
4	OPD KB Kabupaten/Kota	Koordinasi program pengendalian penduduk dan

		keluarga berencana wilayah Kabupaten/Kota
5	Kementerian Agama	Kewenangan dan pengelolaan MTs dan MA menjadi tanggungjawab Kementerian Agama

5) *Policy* (kebijakan)

Kebijakan dibutuhkan untuk mendukung pemasaran sosial dalam melakukan perubahan perilaku yang diharapkan. Kebijakan ini berupa peraturan-peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Untuk program SSK sendiri kebijakan yang mendukung BKKBN yaitu UUD Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Di dalam UUD tersebut juga mengatur tentang kebijakan keluarga berencana usia ideal perkawinan di mana perempuan berumur 20 tahun dan laki-laki berumur 25 tahun yang dapat mendukung *output* program SSK untuk meminimalisir perkawinan usia anak. Seperti yang diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 15 Mei 2019 :

“Kita merujuk kepada UUD Nomor 52 tahun 2009. Itu yang tetap menjadi kebijakan bahwa kependudukan itu penting.”

c. Perencanaan Program

Pada tahap perencanaan, BKKBN DIY merencanakan sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan kepada SMP dan SMA. Sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan apa itu SSK, bagaimana pembentukan ssk dan pengelolaannya juga materi kependudukan itu sendiri. Selain itu juga untuk menawarkan program kepada sekolah. Hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di samping melalui media cetak buku dan *website* untuk menambah informasi guru terhadap program SSK. Untuk mengundang SMA dalam sosialisasi, BKKBN DIY berkoordinasi dengan Dinas DIKPORA DIY karena SMA berada di bawah pengelolaan Dinas DIKPORA Provinsi. Sedangkan untuk SMP, BKKBN DIY melakukan koordinasi dengan OPD KB Kabupaten/Kota karena sekolah SMP berada di bawah pengelolaan Dinas Dikpora Kabupaten/Kota.

Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 15 Mei 2019 :

“Kita ada pemetaan sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi SSK kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi. Potensi sekolah selain adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), karena juga adanya akreditasi perpustakaan sekolah. Selain itu juga ada potensi siswa sekolah yang pernah mengikuti lomba-lomba pidato kependudukan atau lomba karya tulis ilmiah kependudukan yang menunjukkan adanya bibit-bibit yang tertarik dengan isu-isu kependudukan. Kemudian juga ada siswa yang menjadi duta GenRe. Setelah dapat datanya direkap lalu diajukan ke Dinas DIKPORA karena dari BKKBN tidak bisa serta merta mengundang sekolah dalam kegiatan sosialisasi, sehingga dari DISDIKPORA yang mengundang.”

d. Memantau dan Mengevaluasi

Kegiatan memantau dan mengevaluasi program SSK oleh BKKBN DIY sifatnya semacam pendampingan kepada sekolah dengan mengkomunikasikan bagaimana progres program SSK di sekolah. Evaluasi sendiri dilakukan berdasarkan instrumen penilaian yang disusun dari BKKBN Pusat. Instrumen penilaian tersebut digunakan untuk menilai pelaksanaan program SSK di sekolah. Namun untuk saat ini belum ada kegiatan evaluasi dengan menggunakan instrumen penilaian oleh BKKBN DIY secara langsung ke sekolah. Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 15 Mei 2019 :

“Kita belum terlalu terapkan monev dengan instrumen penilaian, karena namanya program baru dan masih tahap awal. Tentu saja nanti ada monev tapi sifatnya lebih seperti pendampingan. Misalnya seperti mengkomunikasikan dengan sekolah apa yang kurang dalam pelaksanaan program, walaupun nanti ada kekurangan akan dilakukan upaya.”

2. Komunikasi Pemasaran Sosial Program Sekolah Siaga Kependudukan

Kegiatan sosialisasi program SSK dilaksanakan oleh Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN DIY yang bertanggungjawab langsung terhadap program SSK. Tentunya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan OPD KB Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dengan Dinas DIKPORA yang memiliki wewenang dalam pengelolaan SD, SMP dan

SMA/SMK serta Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam pengelolaan MI, MTs dan MA.

Kegiatan komunikasi pemasaran sosial program SSK yang dilakukan oleh BKKBN DIY terutama melalui pendekatan langsung atau *personal communication*. Kotler (1989:222) mengatakan promosi melalui *personal communication* antara komunikator dan komunikan dapat memberi dan menerima umpan balik langsung dan berkelanjutan tentang kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang dilakukan BKKBN DIY bertujuan untuk mensosialisasikan program sekolah siaga kependudukan kepada sekolah khususnya SMP dan SMA. Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“BKKBN DIY mengenalkan program SSK ini melalui pertemuan diantaranya diadakan *workshop* terlebih dahulu untuk menyampaikan dan memaparkan informasi atau sosialisasi tentang program SSK. Dari sanalah, mungkin pihak sekolah ada minat untuk menerapkan sekolah siaga kependudukan. Setelah itu dilakukan audiensi dengan kepala sekolah untuk melihat minat sekolah apakah benar-benar mau melanjutkan program ini kedepannya. Lalu jika kepala sekolah setuju untuk menerapkan program SSK kemudian selanjutnya diadakan juga sosialisasi kepada para guru dan peserta didik.”

Adapun kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh pihak BKKBN DIY merujuk pada hasil wawancara dengan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. selaku Ka Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN DIY dan Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc selaku Ka Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan yaitu :

- 1) Penyusunan modul pendidikan kependudukan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengikutsertakan guru SMP dan SMA.

- 2) *Workshop* Pendidikan Kependudukan dengan mengundang kepala SMP dan SMA yang dimaksudkan untuk mengenalkan dan memberi informasi tentang program Sekolah Siaga Kependudukan.
- 3) Audiensi kepada Kepala Sekolah dilakukan untuk menawarkan dan melihat minat sekolah dalam menerapkan program sekolah siaga kependudukan pada sekolahnya.
- 4) Sosialisasi kepada warga sekolah dilakukan setelah sekolah setuju untuk menerapkan program sekolah siaga kependudukan. Sosialisasi ditujukan kepada guru dan murid sebelum program diluncurkan di sekolah.
- 5) *Website* CIS Dalduk dan BKKBN DIY yang terdapat informasi mengenai program SSK dan materi-materi pendidikan kependudukan
- 6) Media cetak buku petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan program SSK serta buku materi pendidikan kependudukan

Penjabaran tentang pelaksanaan sosialisasi akan dijelaskan masing-masing berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berikut penjabaran kegiatan sosialisasi program SSK :

- 1) Peyusunan Modul Pendidikan Kependudukan

BKKBN DIY mulai mengenalkan program SSK pada tahun 2016 melalui penyusunan modul pendidikan kependudukan. BKKBN DIY berkerjasama dengan Dinas DIKPORA dan melibatkan beberapa sekolah

baik SMP maupun SMA dalam penyusunan modul pendidikan kependudukan. Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 15 Mei 2019 :

“Program SSK dipromosikan secara bertahap. Sehingga bagaimana SSK ini bisa diterima kita siapkan modul terlebih dahulu sebagai alat penunjang. Kita siapkan materi, panduan dan petunjuk teknis. Tahun 2016 itu ada penyusunan modul pendidikan kependudukan yang melibatkan sekolah baik SMA maupun SMP berbekal buku modul yang sudah dibuat BKKBN Pusat.”

2) *Workshop* Pendidikan Kependudukan

Untuk mengenalkan program Sekolah Siaga Kependudukan kepada sekolah SMP dan SMA yang berada di DIY, maka BKKBN DIY mengadakan *workshop* yang di dalamnya disampaikan informasi mengenai SSK dan tujuan utama program SSK serta pentingnya pendidikan kependudukan kepada generasi muda. Informasi yang diberikan dalam *workshop* berupa pandangan perkembangan kependudukan dan isu-isu kependudukan yang sedang mejadi tren. Dari *workshop* ini diharapkan BKKBN DIY dapat menumbuhkan kepedulian dan minat sekolah agar mau menerapkan SSK di sekolahnya dengan mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran dan membuat pojok kependudukan.

Seperti yang diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“BKKBN DIY mengenalkan program SSK ini melalui pertemuan diantaranya diadakan *workshop* terlebih dahulu untuk menyampaikan dan memaparkan informasi atau sosialisasi tentang program Sekolah

Siaga Kependudukan. Dari sanalah, mungkin pihak sekolah ada minat untuk menerapkan Sekolah Siaga Kependudukan”

Gambar 3. *Workshop* Pendidikan Kependudukan



Sumber : Dokumentasi BKKBN DIY

Hal ini juga diungkapkan oleh Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Sosialisasi berisi informasi tentang kependudukan itu sendiri. Paling tidak kami memberikan pandangan tentang perkembangan kependudukan saat ini, isu-isu kependudukan apa yang menjadi tren saat ini sehingga harapannya nanti bisa peduli kepada situasi kependudukan saat ini. Dari awal kami sampaikan tujuan utama Sekolah Siaga Kependudukan”

Komunikator dalam kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan diantaranya yaitu dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM yang menyampaikan pentingnya isu kependudukan. Kemudian dari Dinas DIKPORA menyampaikan pentingnya materi pendidikan

kependudukan untuk dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga Kepala SMA Bokpri 1 sebagai sekolah pertama yang menerapkan SSK di Yogyakarta juga menyampaikan tentang bagaimana penerapan SSK di sekolah.

Gambar 4. Kepala SMA Bokpri 1 Yogyakarta Sebagai Komunikator



Sumber: Dokumentasi BKKBN DIY

Seperti yang diungkapkan diungkapkan oleh Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Narasumber selain dari BKKBN yaitu DISDIKPORA karena dengan adanya program ini mereka mempunyai suatu kebijakan tentang pentingnya materi kependudukan yang sasarannya kepada generasi muda. Kemudian ada juga narasumber yang berbicara tentang pentingnya isu kependudukan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. Di sana digambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengalami percepatan dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga perlu untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk.”

Hal ini ditambahkan oleh Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Sebenarnya dari pihak BKKBN sendiri, lalu juga Pak Andar sebagai kepala sekolah Bokpri 1 Yogyakarta yang sudah menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan di sekolahnya.”

3) Audiensi kepada Kepala Sekolah

Sesuai dengan target BKKBN DIY untuk membentuk satu SSK di setiap Kabupaten/Kota, maka audiensi dilakukan kepada SMP dan SMA yang memiliki potensi. Potensi itu diantaranya adanya PIK-R di sekolah, perpustakaan yang terakreditasi, dan siswa-siswi yang pernah mengikuti kegiatan maupun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh BKKBN seperti lomba karya tulis ilmiah tentang kependudukan dan Duta GenRe karena dianggap sebagai bibit-bibit yang peduli terhadap isu-isu kependudukan. Audiensi ke kepala sekolah dimaksudkan untuk menawarkan dan melihat apakah sekolah berminat dan berkomitmen untuk menerapkan program SSK di sekolahnya secara berkelanjutan.

Dalam audiensi disampaikan bahwa dengan dicanangkannya SSK di sekolah berarti sekolah berkomitmen untuk menyediakan sarana pra sarana terkait program SSK yang dananya dari sekolah sendiri. Sekolah bersedia menerapkan integrasi isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran dan membuat pojok kependudukan. Manfaat Pojok kependudukan yaitu dapat mendukung perpustakaan dan dapat meningkatkan kreatifitas siswa melalui pembuatan mading. Selain itu juga melatih peserta didik untuk berorganisasi

melalui kelompok pengelola pojok kependudukan yang dibentuk dengan SK dari kepala sekolah. BKKBN hanya membantu memfasilitasi program diantaranya dengan membuat *workshop* untuk guru-guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SSK dan memberikan buku atau media cetak lainnya yang berisi informasi tentang pendidikan kependudukan. Di samping itu juga disampaikan tahap-tahap pembentukan SSK di sekolah diantaranya yang pertama yaitu menetapkan guru atau bidang yang mengelola program di sekolah. Kemudian tempat yang akan dijadikan pojok kependudukan serta menentukan pelaksanaan sosialisasi program SSK kepada guru dan siswa sebelum program dicanangkan.

Gambar 5. Audiensi kepada Kepala SMA 2 Wonosari



Sumber : Dokumentasi BKKBN DIY

Hal ini juga diungkapkan oleh Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc. saat diwawancarai pada 16 April 2019 :

“Audiensi kepada kepala sekolah kita tawarkan sekolah mau apa tidak menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan. Kalau sekolah bersedia berarti bukan hanya program dari BKKBN, tetapi sekolah bertanggungjawab untuk menjalankan program di sekolahnya.”

4) Sosialisasi kepada Guru dan Siswa

Gambar 6. Sosialisasi di SMA 1 Pengasih



Sumber : Dokumentasi BKKBN DIY

Setelah sekolah dalam hal ini melalui kepala sekolah berkomitmen untuk menerapkan program SSK, kemudian diadakan sosialisasi di sekolah. Sosialisasi ini ditujukan kepada kepada warga sekolah yakni guru dan siswa. Sosialisasi di sekolah mengenai program SSK dan Pojok Kependudukan bertujuan untuk mengenalkan program SSK kepada guru-guru dan siswa sebelum program akhirnya dicanangkan di sekolah yang bersangkutan.

Gambar 7. Sosialisasi di SMA 1 Banguntapan

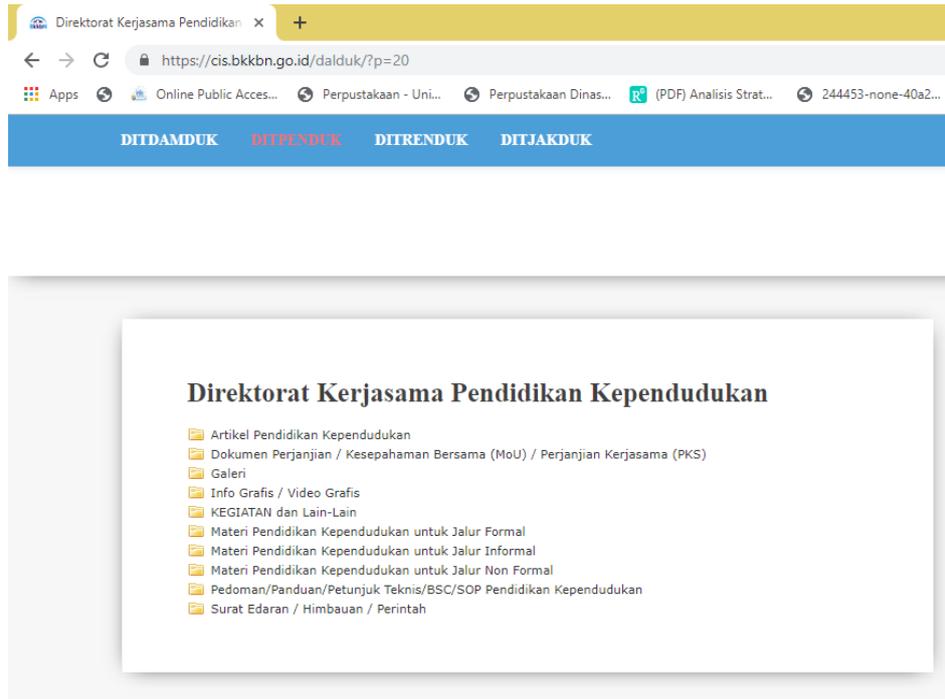


Sumber : Dokumentasi BKKBN DIY

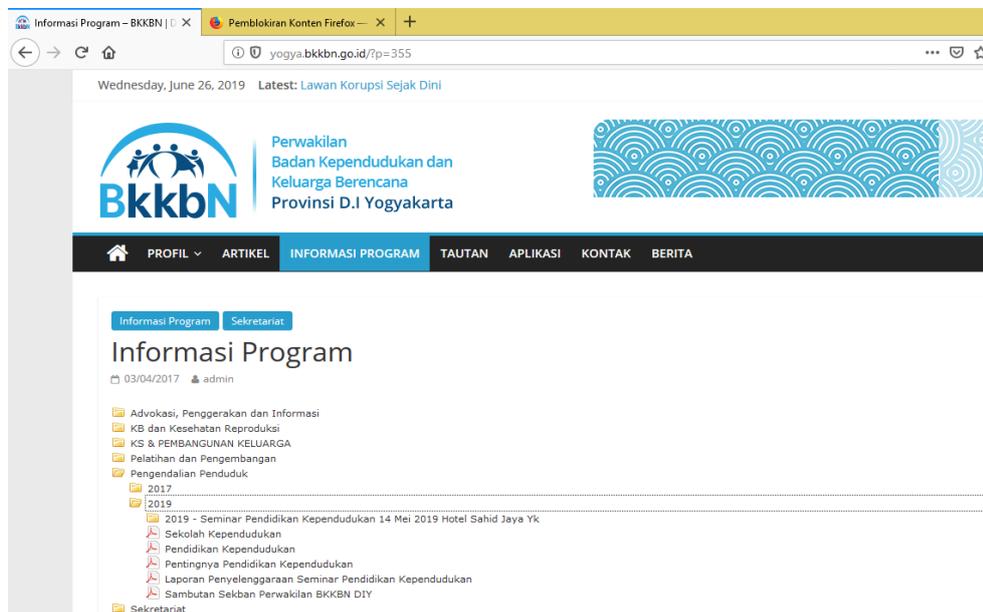
5) *Website*

Selain sosialisasi melalui komunikasi tatap muka, BKKBN DIY juga menginformasikan program SSK melalui media *website* CIS atau *Centralized Information System* yang dikelola oleh BKKBN Pusat. Di dalam *website* disediakan informasi seperti pedoman atau petunjuk teknis program SSK dan materi-materi pendidikan kependudukan yang bisa diunduh. Di samping itu juga ada *website* BKKBN DIY yang dikelola oleh bidang ADPIN, di dalamnya juga terdapat informasi mengenai program SSK dan pendidikan kependudukan. Namun dari segi kuantitas informasi yang disediakan mengenai program SSK, *website* CIS Dalduk lebih lengkap dibandingkan dengan *website* BKKBN DIY.

Gambar 8. Website CIS Dalduk



Gambar 9. Website BKKBN DIY



Sosialisasi program SSK yang dilakukan oleh BKKBN DIY lebih mengutamakan komunikasi tatap muka karena dianggap lebih efektif dan memudahkan pemahaman guru. Hal ini karena terjadi komunikasi dua arah antara BKKBN DIY dengan guru. Selain itu dengan komunikasi tatap muka BKKBN DIY dapat mengetahui apakah guru paham dengan informasi yang diberikan atau tidak. Seperti yang diungkapkan Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. saat diwawancarai pada 26 Juni 2019 :

“Sebenarnya semua cara itu kita tempuh. Tapi minat membaca atau membuka *web* mungkin belum terlalu gemar. Jadi di *website* melalui CIS tetap ada dan itu juga *paperless*, tinggal dibuka tapi tidak semua orang punya minat untuk membuka. Selain itu kita juga upayakan dalam bentuk cetak berupa buku. Kita komunikasi tatap muka sambil mencoba apakah yang kita ajak komunikasi paham, yang kedua kita memanfaatkan tatap muka untuk *sharing* terkait isu-isu kependudukan. Jadi komunikasi tatap muka itu kita anggap banyak manfaatnya dan efektif, selain bisa tahu apakah yang diajak komunikasi paham dengan informasi yang kita sampaikan dan juga kita mendapat masukan.”

Hal ini juga ditambahkan oleh Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc. saat diwawancarai pada 26 Juni 2019 :

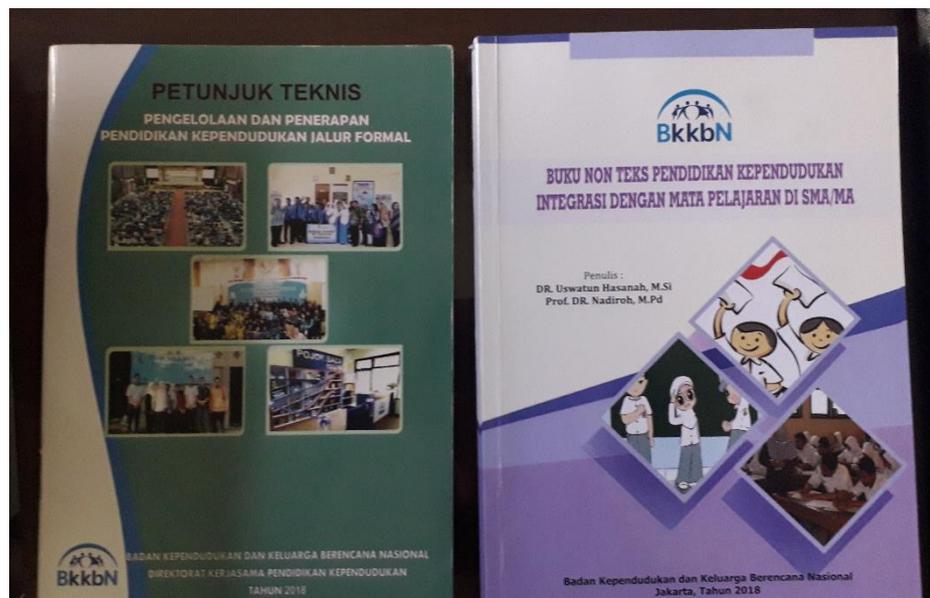
“Kalau untuk *website* kita ada melalui <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/>. Tapi memang untuk tatap muka lebih intens dilakukan untuk memudahkan pemahaman. Karena dengan tatap muka ada komunikasi dua arah seperti *sharing* dengan memberi informasi yang diketahui tentang isu kependudukan yang ada. *Website* BKKBN DIY tentang kependudukan juga ada, tapi lebih lengkap di CIS.”

6) Media Cetak Buku

BKKBN DIY juga berupaya mensosialisasikan program SSK melalui media cetak berupa buku. Buku-buku tentang program SSK ini diantaranya

adalah petunjuk teknis pengelolaan dan penerapan pendidikan kependudukan jalur formal, pedoman pengelolaan pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan, dan materi pendidikan kependudukan. Buku-buku tersebut diberikan kepada sekolah yang berpartisipasi dalam program SSK.

Gambar 10. Media Cetak Buku Pendidikan Kependudukan



Dalam menawarkan program SSK kepada sekolah, BKKBN DIY melakukan *personal selling* melalui audiensi pada kepala sekolah. Kegiatan audiensi pada kepala sekolah ini agar komunikasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak BKKBN DIY dan pihak sekolah serta dapat melibatkan umpan balik secara langsung dari pihak sekolah. Hal ini juga agar BKKBN DIY dapat mengetahui minat sekolah apakah bersedia untuk menerapkan program SSK di sekolahnya. Dalam memutuskan untuk menerapkan program SSK di sekolah, terdapat pihak-pihak yang

mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yaitu terutama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta guru.

Tanggapan dari enam sekolah yang sudah menerapkan program SSK mengenai kegiatan sosialisasi SSK yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY yaitu pihak sekolah memperoleh informasi tentang apa itu program SSK dan tujuan dari program tersebut serta pentingnya materi kependudukan untuk dipahami oleh peserta didik.

Seperti yang diungkapkan Guru Geografi SMAN 1 Banguntapan Bantul, Drs. Sutianah M.Pd. saat diwawancarai pada 29 April 2019 :

“Dengan adanya sosialisasi hingga audiensi ke sekolah itu menunjukkan adanya keseriusan untuk kerjasama antara BKKBN dengan sekolah yang sama-sama aktif dalam mencapai tujuan membentuk SSK di sekolah.

Berikut tanggapan mengenai kegiatan sosialisasi SSK oleh BKKBN DIY yang diungkapkan Kepala SMAN 2 Wonosari Gunung Kidul, Sumardi, S.Pd., M.Pd. saat diwawancarai pada 2 Mei 2019 :

“Karena program Sekolah Siaga Kependudukan baru bagi kami, sehingga kami ingin tahu apa program Sekolah Siaga Kependudukan, kemudian ke depannya harusnya seperti apa. Setelah mendapatkan sosialisasi ternyata program Sekolah Siaga Kependudukan yang terdapat pojok kependudukan di dalamnya *in line* atau sejalan dengan program pembelajaran yang ada di SMA 2 Wonosari khususnya program sekolah sebagai sekolah literasi.”

Berikut tanggapan mengenai sosialisasi SSK oleh BKKBN DIY yang diungkapkan Kepala SMAN 1 Pengasih Kulon Progo, Drs. Ambar Gunawan saat diwawancarai pada 10 Mei 2019 :

“Sudah bagus dan itu kemudian kami teruskan kepada anak-anak. Sosialisasi terkait memberikan fasilitas pojok kependudukan. Jadi anak-anak atau juga warga sekolah lewat buku-buku yang ada itu bisa dibaca terkait bonus demografi yang akan terjadi di mana suatu puncak jumlah usia produktif begitu besar sehingga perlu dikelola dari sekarang. Jadi memang harus bekerjasama, baik dari BKKBN yang langsung menangani tapi lewat sisi sekolah juga harus membantu.”

Berikut tanggapan mengenai kegiatan sosialisasi SSK oleh BKKBN DIY yang diungkapkan Guru Bimbingan Konseling SMPN 1 Seyegan Sleman Wahyu Rahmawati, S.Pd. saat diwawancarai pada 8 Mei 2019 :

“Dari sosialisasi yang di lakukan BKKBN DIY kami jadi mengerti maksud dari Sekolah Siaga Kependudukan dan supaya anak mengerti serta sadar tentang kependudukan. Karena masalah kependudukan itu sebenarnya luas dan penting untuk dipahami oleh anak.”

Berikut tanggapan mengenai kegiatan sosialisasi program SSK oleh BKKBN DIY yang diungkapkan Kepala SMPN 1 Galur Kulon Progo, Sugeng Widadi, S.P., M.Pd. Si. saat diwawancarai pada 9 Mei 2019 :

“Dari sosialisasi kami jadi paham dan merasa bahwa hal ini sangat penting karena kaitannya dengan bagaimana membelajarkan khususnya kesehatan reproduksi bagi anak. Jadi memberikan pemahaman kependudukan lebih awal kepada peserta didik. Secara sisi manfaat jelas karena memberikan literasi bagi anak. Di pojok kependudukan itu ada buku-buku yang bisa dibaca, informasi-informasi yang kaitannya dengan kependudukan, kaitannya dengan kesehatan reproduksi.”

SMA 1 Bokpri sebagai sekolah petama yang menerapkan program SSK di Yogyakarta sebenarnya tidak menerima sosialisasi seperti audiensi maupun sosialisasi di lingkungan sekolah karena kepala SMA Bokpri 1 yakni Pak Andar sudah terlibat sejak awal program SSK akan digulirkan di Yogyakarta. Pak Andar bahkan yang ikut terlibat dalam penyusunan modul

dan menjadi pembicara dalam *workshop* pendidikan kependudukan. Sehingga komunikasi antara BKKBN DIY dengan SMA Bokpri 1 mengenai program SSK hanya dilakukan melalui perbincangan biasa. Hal ini juga didasari karena kepedulian kepala SMA Bokpri 1 tersebut akan pentingnya materi pendidikan kependudukan untuk disampaikan kepada peserta didik. Seperti yang yang diungkapkan Kepala SMA Bokpri 1 Yogyakarta, Drs. Andar Rujito saat diwawancarai pada 29 April 2019 :

“BKKBN itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan, beberapa guru kami libatkan untuk mendengarkan informasi berkaitan dengan kependudukan. Sebenarnya sosialisasi secara khusus ke sini tidak ada, tetapi hanya melalui perbincangan kami dengan BKKBN”

B. PEMBAHASAN

Setelah menyajikan data, selanjutnya yaitu pembahasan untuk mengkritisi data dengan teori yang digunakan. Adapun pembahasan dibagi menjadi dua sub bab sebagaimana pada sajian data, sebagai berikut :

1. Tahapan Pemasaran Sosial Program Sekolah Siaga Kependudukan

a. Tahap Analisis dan Pemilihan Target Sasaran

Program Sekolah Siaga Kependudukan bertujuan untuk memberikan wawasan kependudukan kepada peserta didik melalui integrasi isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran serta tersedianya literasi dan informasi mengenai masalah kependudukan di Pojok Kependudukan. Latar belakang diadakannya program ini karena jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, angka kelahiran nasional, laju pertumbuhan penduduk yang cepat, masalah

perkawinan usia anak serta rata-rata lama sekolah yang tidak sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun. Program SSK merupakan bentuk upaya pendidikan kependudukan kepada generasi muda agar memahami berbagai permasalahan kependudukan sehingga bisa peduli dan menerapkan ke dalam perilaku yang mendukung dalam pengendalian jumlah penduduk.

Program SSK adalah salah satu implementasi Pendidikan Kependudukan jalur formal yang menyasar generasi muda khususnya pelajar SD, SMP dan SMA. Menyasar generasi muda dalam mengedukasi isu-isu kependudukan sudah semestinya dilakukan agar mereka dapat memahami dan peduli terhadap isu-isu kependudukan sejak dini. Wawasan tentang kependudukan sendiri sangat luas, diantaranya tentang manfaat dan dampak jumlah penduduk, transmigrasi penduduk, pemahaman kesehatan reproduksi remaja dan lainnya. Dengan adanya pemahaman dan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan diharapkan dapat mempengaruhi perilaku-perilaku remaja yang mendukung dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia salah satu satunya dengan tidak melakukan perkawinan usia anak. Pada tahap analisis sebagai tahapan pertama dalam melaksanakan pemasaran sosial, BKKBN DIY tidak melaksanakan hal tersebut karena program SSK merupakan program yang dibentuk oleh BKKBN Pusat dengan analisis lingkungan di Indonesia secara keseluruhan, sehingga tidak ada latar belakang khusus maupun analisis yang dilakukan BKKBN DIY di Yogyakarta. Sebagai perwakilan BKKBN provinsi, BKKBN DIY hanya meneruskan program dari pusat.

Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif dan usia muda lebih besar dari jumlah usia tidak produktif. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan generasi muda berkualitas yang mampu dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Bonus demografi sebaliknya akan menjadi bencana ketika usia produktif yang ada tidak mempunyai kualitas yang baik dari segi pengetahuan dan keterampilan sehingga yang terjadi adalah tingginya jumlah pengangguran serta kemiskinan yang akan menjadi beban negara. Maka peran pendidikan kependudukan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada generasi muda agar mereka memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan kependudukan yang ada serta dapat membentuk perilaku yang mendukung kehidupan masa depan mereka yang lebih baik. Pada pemilihan target sasaran program SSK, BKKBN DIY juga tidak melakukan hal itu karena kembali lagi program SSK merupakan program nasional yang dibentuk oleh BKKBN pusat sehingga pemilihan target sasaran juga dilakukan oleh BKKBN pusat.

Dari temuan data tersebut, walaupun BKKBN DIY tidak melakukan analisis dan pemilihan target sasaran di Yogyakarta, menurut peneliti analisis maupun temuan data-data berupa permasalahan kependudukan di Indonesia dan generasi muda yaitu pelajar sekolah sebagai target sasaran dinilai sudah sesuai dengan tujuan dalam memberi pemahaman kepada generasi muda mengenai kependudukan sejak dini untuk mengurangi permasalahan kependudukan salah satunya perkawinan usia anak.

b. Tahapan Bauran Pemasaran Sosial

1) *Product* (produk)

Menetapkan produk sosial harus sesuai dengan target sasaran dan target capaian. Produk program Sekolah Siaga Kependudukan yang ditawarkan adalah gagasan atau ide agar para siswa dapat memahami dan peduli terhadap berbagai permasalahan kependudukan yang luas dan mengimplentasikan ke dalam kehidupannya sehingga mereka dapat merencanakan masa depannya sebaik mungkin serta tidak melakukan perkawinan usia anak, karena salah satu *output* dari program SSK ini yaitu meminimalisir perkawinan usia anak. Produk program SSK sudah cukup tepat karena secara umum sudah sesuai dengan target sasaran dan target capaian.

2) *Price* (harga)

Pojok Kependudukan dikelola secara mandiri oleh sekolah melalui siswa yang tergabung dalam kelompok kepengurusan. Terdapat pengeluaran biaya berupa *monetary cost* dalam pengelolaan pojok kependudukan. Kotler dalam Pudjiastuti (2016:13) membagi bentuk *price* dalam pemasaran ke dalam dua kelompok yaitu *monetary cost* dan *non monetary cost*. *Monetary cost* berupa sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk sosial sedangkan *non monetary cost* berupa waktu yang dikorbankan untuk mendapatkan produk sosial. Selain itu terdapat kegiatan-kegiatan di sekolah yang menyisipkan program SSK di dalamnya seperti lomba puisi

tentang kependudukan saat Bulan Bahasa di SMA Bokpri 1 atau membuat *stand* pojok kependudukan saat *school fair* di SMA 1 Banguntapan yang tentunya terdapat pengeluaran biaya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan pengeluaran biaya dari program SSK tidak membebani sekolah karena tiap sekolah berbeda-beda tergantung dari kreatifitas masing-masing sekolah dalam mengelola program SSK di sekolahnya. BKKBN DIY sendiri tidak mewajibkan sekolah yang telah menerapkan program SSK untuk menggelar kegiatan khusus bagi program SSK di sekolah.

3) *Place* (tempat)

Pentingnya pendidikan kependudukan agar dapat didistribusikan kepada peserta didik, maka BKKBN DIY menargetkan agar program SSK terdapat setidaknya satu di setiap SMP dan SMA yang berada di kabupaten/kota DIY pada tahun 2018. Selanjutnya dengan adanya sekolah-sekolah yang telah menerapkan program SSK, BKKBN DIY berharap dapat dicontoh oleh SMP dan SMA lainnya yang berada di wilayah DIY sehingga jumlah sekolah yang menerapkan program SSK terus meningkat dan semakin banyak peserta didik yang memahami pendidikan kependudukan. Pemilihan tempat produk sosial SSK sejauh ini sudah cukup tepat untuk distribusi pendidikan kependudukan kepada peserta didik SMP dan SMA. Kedepannya BKKBN DIY dapat mendistribusikan pendidikan kependudukan ke peserta didik SD.

4) *Partnership* (kemitraan)

Dalam menjalankan program SSK, BKKBN DIY menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Mitra kerjasama penting untuk memudahkan pengelolaan program dan mendukung keberlangsungan program. Kerjasama juga dilakukan agar memudahkan BKKBN DIY dalam mejaring sekolah-sekolah dalam kegiatan sosialisasi program SSK. Mitra kerjasama BKKBN DIY sudah sesuai dengan kebutuhannya agar dapat sampai kepada target sasaran yaitu SMP dan SMA. Mitra BKKBN DIY dalam menjalankan program SSK yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap Sekolah Menengah Atas
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap Sekolah Menengah Pertama
3. Kementerian Agama yang memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap sekolah Madrasah
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana wilayah provinsi
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana wilayah kabupaten/kota

6) *Policy* (kebijakan)

Kebijakan yang mendukung pemasaran sosial program SSK yaitu UUD Nomor 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana salah satunya usia ideal perkawinan di mana perempuan berumur 20 tahun dan laki-laki berumur 25 tahun. Kebijakan ini sudah sesuai dengan *output* yang ingin dicapai untuk meminimalisir perkawinan usia anak. Sebagai masukan kepada BKKBN, BKKBN dapat membantu dengan mendorong adanya peraturan baru mengenai usia perkawinan di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Agar terjadi pendewasaan usia perkawinan dan target untuk meminimalisir perkawinan usia anak dapat tercapai.

c. Perencanaan Program

Perencanaan program yang dilakukan BKKBN DIY sudah cukup tepat untuk dapat sampai kepada target sasaran SMP dan SMA yaitu dengan berkoordinasi dengan mitra kerjasama, dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota dan OPD KB provinsi maupun kabupaten/kota.

d. Memantau dan Mengevaluasi

Kegiatan memantau dan mengevaluasi program SSK oleh BKKBN DIY sifatnya dilakukan masih semacam pendampingan kepada sekolah. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun oleh BKKBN Pusat. Instrumen penilaian tersebut untuk menilai pelaksanaan program SSK di sekolah. Namun untuk saat ini belum ada kegiatan evaluasi

oleh BKKBN DIY secara langsung ke sekolah, hanya berupa komunikasi dengan sekolah untuk melihat perkembangan berjalannya program SSK di sekolah. Untuk kegiatan evaluasi sendiri sebaiknya mulai dilakukan secara berkelanjutan oleh BKKBN DIY dengan instrumen penilaian dari BKKBN Pusat, agar dapat mengetahui progres setiap sekolah yang menerapkan program SSK. Sehingga adanya kekurangan dalam pengelolaan program SSK oleh sekolah maupun BKKBN DIY dapat dibenahi.

2. Komunikasi Pemasaran Sosial Program Sekolah Siaga Kependudukan

Kegiatan promosi program SSK dilakukan terutama melalui pendekatan langsung atau *personal communication*. Kotler (1989:221) mengatakan promosi dan penyampaian produk sosial sangat tergantung pada kualitas komunikasi interpersonal, interaksi, dan layanan yang disediakan oleh pemasar sosial. *Personal communication* digunakan di hampir setiap aspek promosi produk sosial. Promosi yang dilakukan BKKBN DIY bertujuan untuk mensosialisasikan program SSK kepada SMP dan SMA. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan program dan menawarkan program kepada sekolah agar menerapkan integrasi isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran. Berikut kegiatan sosialisasi program SSK yang dilakukan oleh BKKBN DIY berdasarkan hasil wawancara :

- 1) Penyusunan modul pendidikan kependudukan yang dilakukan pada tahun 2016 dengan mengikutsertakan guru SMP dan SMA.

- 2) *Workshop* Pendidikan Kependudukan yang dilakukan dengan mengundang kepala-kepala sekolah yang dimaksudkan untuk mengenalkan tentang program Sekolah Siaga Kependudukan.
- 3) Audiensi kepada Kepala Sekolah dilakukan untuk menawarkan program dan melihat apakah sekolah berminat untuk menerapkan program sekolah siaga kependudukan pada sekolahnya.
- 4) Sosialisasi kepada warga sekolah dilakukan setelah sekolah setuju untuk menerapkan program sekolah siaga kependudukan. Sosialisasi ditujukan kepada guru dan murid sebelum program diluncurkan di sekolah.
- 5) *Website* CIS Dalduk dan BKKBN DIY yang terdapat informasi mengenai program SSK dan materi-materi pendidikan kependudukan
- 6) Media cetak berupa buku petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan program SSK serta materi pendidikan kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara BKKBN DIY mensosialisasikan program SSK melalui komunikasi tatap muka dan juga melalui media seperti *website* serta media cetak berupa buku. Sosialisasi program SSK diadakan pada tahun 2016 dalam kegiatan penyusunan modul pendidikan kependudukan yang melibatkan Dinas DIKPORA DIY serta guru SMP dan SMA. Pada kegiatan tersebut disampaikan program SSK yang akan digulirkan di Yogyakarta dan dijelaskan apa itu program Sekolah Siaga Kependudukan. Menurut peneliti kegiatan penyusunan modul pendidikan kependudukan yang diselenggarakan

sudah tepat untuk sekaligus menyampaikan informasi mengenai program SSK yang akan digulirkan, di samping karena modul pendidikan kependudukan tersebut sebagai alat penunjang yang akan digunakan untuk bahan materi pembelajaran.

Berikutnya kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan yang ditujukan bagi kepala SMP dan SMA. Kegiatan *workshop* ini bertujuan untuk mensosialisasikan program SSK dengan memaparkan informasi tentang program SSK. Pada kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan dijelaskan tujuan utama program SSK serta pentingnya pendidikan kependudukan kepada generasi muda. Informasi yang diberikan dalam *workshop* berupa pandangan perkembangan kependudukan dan isu-isu kependudukan yang mejadi tren. Dari *workshop* ini BKKBN DIY berharap dapat menumbuhkan kepedulian dan minat sekolah agar mau menerapkan SSK di sekolahnya dengan mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran dan membuat pojok kependudukan.

Komunikator dalam kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan diantaranya yaitu dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM yang menyampaikan pentingnya kesadaran dan pemahaman tentang isu kependudukan. Di samping itu PSKK UGM menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami percepatan dalam kurun waktu yang singkat, sehingga perlu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Kemudian dari Dinas DIKPORA DIY menyampaikan pentingnya materi pendidikan kependudukan untuk disampaikan peserta didik dan dapat dipahami. Selain

itu juga Kepala SMA Bokpri 1 sebagai sekolah pertama yang menerapkan SSK di Yogyakarta menyampaikan tentang bagaimana penerapan SSK di sekolah. Menurut peneliti kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan yang diselenggarakan sudah tepat dalam mensosialisasikan program SSK. Komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi dalam sosialisasi memiliki pemahaman yang sesuai tentang isu kependudukan dan pendidikan kependudukan maupun program SSK. Pesan yang disampaikan dalam sosialisasi juga tepat untuk memberi pemahaman kepada pihak sekolah terhadap pentingnya pendidikan kependudukan dan bagaimana penerapan program SSK di sekolah.

Selanjutnya kegiatan sosialisasi program SSK yang dilakukan oleh BKKBN DIY yaitu dengan audiensi kepada Kepala Sekolah. Audiensi ke kepala sekolah dimaksudkan untuk menawarkan dan melihat apakah sekolah berminat dan berkomitmen untuk menerapkan program SSK di sekolahnya. Informasi yang disampaikan dalam audiensi diantaranya yaitu dengan dicanangkannya SSK di sekolah berarti sekolah berkomitmen untuk menyediakan sarana pra sarana terkait program SSK yang dananya dari sekolah sendiri. Selain itu disampaikan manfaat pojok kependudukan yang dapat mendukung perpustakaan dan dapat meningkatkan kreatifitas siswa melalui pembuatan mading juga melatih peserta didik untuk berorganisasi melalui kelompok pengurus pojok kependudukan yang dibentuk dengan SK dari kepala sekolah. Di samping itu juga disampaikan tahap-tahap pembentukan SSK di sekolah yaitu yang pertama menetapkan Guru atau

bidang yang mengelola program di sekolah. Kemudian tempat yang akan dijadikan pojok kependudukan serta menentukan pelaksanaan sosialisasi program SSK kepada Guru dan Siswa sebelum program dicanangkan. Menurut peneliti audiensi kepada kepala sudah tepat untuk dilakukan mengingat audiensi ini sebagai tindak lanjut dari *workshop* pendidikan kependudukan untuk menawarkan program SSK pada kepala sekolah. Audiensi memungkinkan komunikasi secara langsung dan umpan balik antara BKKBN DIY dengan pihak sekolah dalam mengkomunikasikan program SSK.

Setelah sekolah dalam hal ini melalui kepala sekolah berkomitmen untuk menerapkan program SSK, kemudian diadakan sosialisasi di sekolah mengenai program SSK dan Pojok Kependudukan kepada warga sekolah yakni guru dan siswa. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan SSK kepada guru-guru dan siswa sebelum program akhirnya dicanangkan di sekolah yang bersangkutan. Menurut peneliti sosialisasi kepada warga sekolah tepat untuk dilakukan mengkomunikasikan program SSK kepada warga sekolah, karena sebelumnya hanya beberapa guru yang menerima atau mengikuti sosialisasi tentang program SSK.

BKKBN DIY juga menginformasikan program SSK melalui media *website* CIS atau *Centralized Information System* yang dikelola oleh BKKBN Pusat dan *website* BKKBN DIY yang dikelola oleh bidang ADPIN. Di dalam *website* tersedia informasi seperti pedoman atau petunjuk teknis program SSK dan materi-materi pendidikan kependudukan yang bisa diunduh. Namun dari

segi kuantitas informasi yang disediakan tentang program SSK, *website* CIS Dalduk lebih lengkap dibandingkan dengan *website* BKKBN DIY. Sosialisasi tatap muka lebih diutamakan oleh BKKBN DIY karena lebih efektif dan memudahkan komunikasi dalam memahami informasi yang diberikan. Hal ini karena terjadi komunikasi dua arah antara BKKBN DIY dengan komunikasi dan untuk *website* sendiri dianggap tidak semua memiliki minat untuk mengakses. Menurut peneliti informasi mengenai program SSK di *website* perlu ditingkatkan terutama melalui *website* BKKBN DIY mengingat fungsi dari *website* pemerintah untuk memudahkan tersampainya informasi kepada publik.

Selain sosialisasi melalui *website*, BKKBN DIY juga berupaya membuat media cetak berupa buku yang berisi informasi mengenai program SSK. Buku seperti pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis penerapan program SSK akan membantu pihak sekolah dalam memahami penerapan program SSK. Hanya saja buku-buku yang didistribusikan kepada sekolah yang berpartisipasi dalam program SSK ini masih terbatas karena keterbatasan dana dalam mencetak buku.

Tanggapan dari Kepala sekolah maupun guru yang berpartisipasi dalam sosialisasi program SSK mengenai kegiatan sosialisasi SSK yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY berdasarkan hasil wawancara yaitu pihak sekolah memperoleh informasi tentang apa itu program SSK, pokok kependudukan, tujuan dan manfaat dari program SSK serta pentingnya materi kependudukan untuk dipahami oleh peserta didik. Guru menjadi paham

adanya program SSK ini sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai permasalahan kependudukan yang luas terutama edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi anak. Guru juga menjadi paham pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan yaitu isu-isu kependudukan yang dimasukkan ke dalam kegiatan belajar mengajar, disisipkan dan disesuaikan dengan materi mata pelajaran. Sehingga manfaat yang ditimbulkan bukan hanya perilaku mendukung peserta didik yang dapat mengurangi permasalahan kependudukan tetapi juga lingkungan sekolah yang sadar akan isu-isu kependudukan dan menyebarkannya di dalam lingkungan sekolah.